

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-1 September 2021 (tanggal 27 Agustus s.d. 2 September)

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAERAH



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dinar Wahyuni
Peneliti Madya/Kesejahteraan Sosial
dinar.wahyuni@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Sampai dengan 1 September 2021, sebanyak 1977 tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia gugur melawan Covid-19. Profesi nakes sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 memang sangat riskan. Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif kepada nakes yang menangani pasien Covid-19. Pembayaran insentif nakes daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan alokasi APBD. Kebijakan *refocusing* APBD 2021 telah menggariskan 8% DAU dan DBH 2021 untuk penanganan Covid-19, termasuk insentif tenaga kesehatan daerah. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk nakes daerah seharusnya terjamin.

Dalam pelaksanaannya, hasil pemantauan rutin Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih banyak daerah yang belum membayarkan insentif nakes daerah. Daerah baru merealisasikan anggaran insentif nakes daerah yang bersumber dari *refocusing* 2021 sebesar Rp3,72 triliun atau 39,51% dari pagu yang sebesar Rp9,42 triliun per 15 Agustus 2021. Persoalan insentif tidak hanya berupa keterlambatan pencairan, tetapi juga pemotongan dana. Laporan Covid-19 mencatat, sejak Januari 2021, aduan terkait insentif paling banyak dari Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan insentif, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak fasilitas kesehatan.

Keterlambatan pencairan insentif merupakan salah satu bagian dari masalah klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aturan birokrasi yang panjang dan akurasi database nakes menjadi penghambat dalam pencairan insentif nakes. Selain itu, ada yang minim APBD atau telah menggunakan anggaran insentif nakes untuk hal lain terkait penanganan Covid-19 menyebabkan keterlambatan pencairan insentif nakes. Berbagai permasalahan pembayaran insentif nakes mendorong Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat teguran kepada kepala daerah yang belum secara optimal merealisasikan anggaran insentif nakes di daerahnya.

SUMBER

kompas.com. 27 Juli 2021; media indonesia, 1 dan 2 September 2021; cnnindonesia.com, 20 Agustus 2021.